

# **ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DI SEKOLAH INDONESIA BANGKOK (SIB) THAILAND**

Oleh :

**Yustifa Tariful Mujjana Khariyah**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Abd. Madjid., M.Ag**

*Fakultas Agama Islam , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan)  
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183.*

*E-mail : [yustifachoiriyah@gmail.com](mailto:yustifachoiriyah@gmail.com)*

*Dosenpembimbingskripsi : [abdulmadjid8@umy.ac.id](mailto:abdulmadjid8@umy.ac.id)*

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang perumusan kebijakan pendidikan pengembangan kompetensi professional guru di Sekolah Indonesia Bangkok, mengetahui implementasi kebijakan pengembangan kompetensi professional guru serta dampak yang terjadi bagi siswa dan guru dengan kebijakan tersebut.*

*Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif jenis lapangan. Subjek pada penelitian ini sebanyak 16 guru dan siswa Sekolah Indonesia Bangkok yang diambil menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pengumpulan data, klasifikasi data, reduksi data, triangulasi data dan menarik kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat kebijakan pengembangan kompetensi professional guru yang terbagi menjadi kebijakan standar isi, kebijakan standar proses, kebijakan standar pendidik dan kependidikan dengan latar belakang kebijakan berdasarkan landasan historis, landasan yuridis dan landasan geografis. (2) implementasi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. (3) terdapat dampak bagi siswa dan guru dengan pelaksanaan kebijakan tersebut yakni menjadi ilmu dan pengetahuan bagi guru SILN dengan tanggung jawab dan professional, juga bagi siswa yakni mendapatkan pendidikan yang bermutu dan mencetak generasi yang berintelektual.*

**Kata kunci:** *kebijakan, pendidikan, kompetensi professional guru.*

## **Abstrak**

*This research aims at identifying the background of the teacher's professional competence development policy at Sekolah Indonesia Bangkok, at identifying the implementation of teacher's professional competence development policy and the impacts on the students and teachers.*

*This research used field descriptive qualitative approach. The subjects of the research were 16 teachers and students of Sekolah Indonesia Bangkok. The data were taken through the techniques of interview, observation, and documentation. The data analysis was conducted through the stages of data collection, data classification, data reduction, data triangulation, and conclusion.*

*The result of the research shows that: (1) the policy of teacher's professional competence development is divided into policy of content standard, policy of process standard, policy of standard of educator and education with the background of the policy based on historical foundation, juridical foundation, and geographical foundation. (2) The policy has been well implemented and is in accordance with the existing regulation. (3) The implementation of the policy gives impacts on students and teachers such as becoming study and knowledge for teachers of Indonesian School Abroad (SILN) with responsibility and professionalism, and for the students, they receive a quality education, and it also creates intellectual generation.*

**Keywords:** *policy, education, teacher's professional competence.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa, sebab pendidikan merupakan tolok ukur yang akan membawa manusia kearah masa depan. Dengan adanya pendidikan itu sendiri kita dapat mengetahui kepentingan dalam perkembangan pada diri manusia yang meliputi tingkah laku, sifat, sikap, watak, yang semua itu akan sangat mempengaruhi dan berdampak pada diri manusia, serta bangsa dan Negara. Hal tersebut membuktikan bahwa Negara sangat membutuhkan manusia-manusia atau orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, agar dapat mencetak generasi yang selalu berfikir dan bekerja cerdas, cermat dan tuntas, memiliki pola pikir yang logis, kritis, kreatif dan inovatif juga orang-orang yang memiliki karakter, semangat, berbudi luhur, sopan santun, dan sifat antusias yang tinggi.

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yaitu sebuah aturan dan juga keputusan yang dibuat oleh pihak tertentu (pemerintah) berdasarkan

beberapa pertimbangan guna mengatur atau mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) , demi kepentingan umum, masyarakat, penduduk dan pihak-pihak yang terlibat agar diperoleh hasil yang optimal (Kamars, 2017, p. 63). Kebijakan yang telah dibuat melalui tahapan-tahapan diantaranya pembuatan suatu kebijakan, berawal dari perencanaan, agenda kebijakan, latar belakang sebuah kebijakan dibuat, dan dilanjutkan pengesahan lalu ke tahap pelaksanaan atau implementasi, dan berakhir dengan penilaian (Simatupang, 2017, p. 7).

Dalam dunia pendidikan setiap Negara memiliki visi misi serta tujuan masing-masing. Dimana kedua harapan tersebut akan dapat berjalan dengan baik atau dapat dikatakan berhasil manakala setiap perwujudan diselenggarakan sesuai sistem ataupun aturan pendidikan dengan baik. Yang nantinya akan berpengaruh pada peserta didik yang memiliki jiwa memajukan bangsa, baik dari segi karakter bangsa dan kecerdasan bangsa yang akan menciptakan bangsa mampu bersaing unggul dalam persaingan bangsa. Oleh sebab itu potret pendidikan itu sendiri tidak lain dibawah tanggung jawab suatu Negara. Dimana aturan yang berkenaan dengan pendidikan diatur dalam kebijakan pendidikan, yakni salah satunya adalah kebijakan pengembangan professional guru. Sebab guru merupakan tolok ukur utama dalam mencetak generasinya. Dimana kebijakan pendidikan itu merupakan keputusan dan tindakan guna mengatur kepentingan publik, yaitu penduduk, masyarakat dan warga Negara.

Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidik dinegara Indonesia ini pendidikan harus meliputi setidaknya empat perkara yakni, kurikulum, tenaga pendidik, sarana pendidikan, dan kepemimpinan satuan pendidikan. Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) merupakan salah satu sekolah Indonesia luar negeri (SILN). Sekolah Indonesia yang berada di Bangkok ini merupakan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan sebagai sarana pelayanan pendidikan bagi warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri tepatnya di Bangkok. Sekolah ini terdiri dari siswa Indonesia yang berada di Bangkok juga mayoritas anak-anak diplomat serta staf KBRI dan dengan pendidik dari Indonesia yang telah lulus tahap seleksi guru SILN (Regina, 2019, p. 45).

Realita yang terjadi kebijakan pengembangan kompetensi professional guru di SILN terutama Sekolah Indonesia Bangkok, memiliki kebijakan yang sama yakni dalam aturan pemerintah. Persamaan yang dimaksud adalah dalam segi indikator, kualifikasi, kurikulum, dan segala aturan atau kebijakan menjadi guru professional sesuai dengan bidang studi yang diajar. Akan tetapi memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaan yang dimaksud yakni dalam segi pelaksanaan dan juga penambahan pengembangan kompetensi yang ada, seperti di Indonesia terdapat workshop, studi lanjut, profesi, seminar dan lain-lain untuk mengembangkan kompetensi guru sedangkan di Sekolah Indonesia Bangkok juga melaksanakan sesuai yang ada di Indonesia akan tetapi terdapat beberapa pengembangan kompetensi yang tidak ada di Indonesia seperti perkumpulan guru dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), perkumpulan pendidik dengan kementerian luar negeri, perkumpulan dan rapat guru dengan Sekolah Thailand dan juga pelaksanaan workshop antar Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang berada di Asia Tenggara, yang mana semua perkumpulan dan proses pembangunan kompetensi yang ada yakni bertaraf Internasional. Sehingga mutu kualitas pendidikanpun berbeda dengan sekolah yang ada didalam Negeri.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang kebijakan pendidikan pengembangan kompetensi professional guru, implementasi kebijakan serta dampak terhadap siswa dan guru. Adapun masalah pokok yang diteliti yakni (1) Bagaimana latar belakang kebijakan pengembangan kompetensi professional guru di Sekolah Indonesia Bangkok ? (2) Bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengembangan kompetensi profesional guru di Sekolah Indonesia Bangkok ? (3) Apa dampak bagi siswa dan guru dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi professional guru di Sekolah Indonesia Bangkok ? penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kebijakan pendidikan pengembangan kompetensi professional guru di Sekolah Indonesia Bangkok, untuk mengetahui implementasi kebijakan dan juga untuk menganalisis dampak terhadap siswa dan guru.

Untuk mempertajam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti meninjau terhadap penelitian terdahulu yakni, Pertama, jurnal dengan judul "*Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru*", yang ditulis oleh Eka Prihatin

Disas, dimuat dalam jurnal penelitian pendidikan, Vol. 17, No. 2, 2017, yang menyimpulkan bahwa guru memegang peranan yang sangat penting dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta guru tidak bisa digantikan oleh orang lain apalagi didalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional (Disas, 2017, pp. 161-164).

Kedua, jurnal dengan judul “*Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madratsah*”, yang ditulis oleh Hasan Baharun, dimuat dalam jurnal ilmu tarbiyah, Vol. 6, No. 1, 2018, yang menyimpulkan bahwa melalui kebijakan juga aturan yang telah diterapkan di Madratsah melalui aspek dan pihak mengenai aspek pengembangan nilai budaya local yang melingkupi budaya sekolah maka kompetensi guru di madratsah dapat dikembangkan dengan baik dengan mewujudkan guru yang professional (Baharun, 2017, pp. 13-18). Ketiga, jurnal dengan judul, “*Guru Profesional*”, yang ditulis oleh Abdul Hamid, dimuat dalam jurnal ilmiah keislaman dan kemasyarakatan, Vol. 17, No. 2, 2017, yang menyimpulkan bahwa sasaran sikap professional keguruan meliputi sikap terhadap peraturan perundang-undang, organisasi profesi, teman sejawat, anak didik, tempat kerja, pemimpin dan juga pekerjaan (Hamid, 2017, pp. 280-283). Keempat, jurnal dengan judul, “*Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru di UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*”, yang ditulis oleh Hanip Hamdani, dimuat dalam jurnal penelitian pendidikan, Vol. 6, No. 2, 2017 yang menyimpulkan bahwa beberapa kebijakan yang dilakukan oleh UPT DISDIKPORA dalam rangka meningkatkan kompetensi guru terwujud dalam program-program diantaranya workshop, kelompok kerja guru, pembinaan, santapan rohani, kursus computer dan beasiswa studi (Hamdani, 2017, pp. 176-179).

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian berupa analisis yang diperoleh dari penyimpulan deduktif dan induktif dan juga berupa analisis sesuai dengan yang dilakukan oleh peneliti berupa pengamatan fenomenologi dengan dipacu oleh logika ilmiah (Saifuddin, 2016, p. 5).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan baik tertulis maupun lisan yang telah peneliti tunjuk untuk memperoleh data (Moleong, 2016, p. 4).

Selanjutnya dalam meneliti langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian kualitatif jenis *lapangan (fielt Research)* dimana peneliti langsung ikut serta dalam pengamatan dilokasi serta berpartisipasi secara langsung oleh subjek dan objek yang akan diinginkan. Dimana keberangkatan penelitian dimulai dari lapangan guna melakukan pengamatan secara langsung terhadap femonologi yang ada.

Sedangkan subjek dalam peneliti ini adalah guru dan siswa di Sekolah Indonesia Bangkok serta guru dan siswa dari sekolah di Indonesia sebagai subjek penelitian. Yang berjumlah 16 guru sebagai sumber data yang paling utama dan siswa sebagai sumber data pendukung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah Wawancara adalah teknik yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data dimana cara ini dilakukan oleh tatap muka atau secara langsung dengan tanya jawab, dari peneliti terhadap sumber data (Widoyoko, 2016, pp. 33-34). Wawancara itu sendiri bisa dikatakan dengan interview yakni berupa alat evaluasi berbentuk non-test. Melalui percakapan terhadap guru ataupun peserta didik (Arifin, 2014, p. 157). Sedangkan observasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan secara langsung terjun lapangan dengan melihat fenomena yang ada secara langsung. Dimana segala hal yang akan diamati dapat dilakukan dalam observasi ini secara benar dan lengkap, yang dapat digunakan dengan pengamatan dan pencatatan. Adapun dokumentasi merupakan langkah dilakukan peneliti dalam memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada seperti, buku, majalah, nilai, catatan, notulen, dan lain sebagainya. Sehingga dokumentasi dapat membantu dari hasil penelitian wawancara dan juga observasi menjadi lebih luas dan valid. Selanjutnya dokumentasi berguna sebagai pengumpulan data dimana data tersebut bersifat catatan, seperti data siswa, buku pedoman, sejarah dan lain sebagainya.

Selanjutnya setelah melakukan metode pengumpulan data terdapat teknik analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, klasifikasi data, reduksi data, triangulasi data dan menarik kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data yakni metode diatas seperti

wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, klasifikasi data merupakan data merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif. Tanpa klasifikasi data tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis. Selain itu kita tidak bisa membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsenan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data itu (Widoyoko, 2016, p. 46). pada tahap terakhir yakni menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Sekolah Indonesia Bangkok**

Sejarah Sekolah Indonesia Bangkok tidak lain yakni berawal dari cita-cita Bangsa Indonesia dalam upaya mencerdaskan masyarakatnya, yaitu Pemerintah Indonesia mendirikan layanan berbagai lembaga pendidikan dalam mengupayakan dan memberikan layanan pendidikan kepada warganya salah satunya yakni kepada rakyat Indonesia yang berdomisili dan bekerja di luar negeri. Dapat kita ketahui 15 Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang tersebar di 11 negara diantaranya, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, Jepang, Saudi Arabiyah, Syiriah, Mesir, Belanda dan Rusia. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia yang berada di Negara tersebut dengan mengikuti aturan dan pendidikan layaknya di Indonesia dengan kurikulum yang telah di gabungkan antara Indonesia dengan Negara masing-masing.

Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) merupakan satu-satunya sekolah Indonesia yang berada di Thailand, sekolah ini berdiri pada tanggal 6 Oktober 1962 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Berdirinya sekolah ini setelah berlangsungnya kerja sama antara Kementerian Luar Negeri (KEMENLU) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD), yang selanjutnya dibangunlah Sekolah Indonesia Bangkok pada tahun 1967. Sekolah ini berawal hanya SMP dan SMA saja yang diresmikan oleh: H.R. Dharsono Duta Besar RI untuk Thailand tanggal 14 Januari 1971. Namun pada saat ini Sekolah Indonesia Bangkok sudah terdiri dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Sekolah Indonesia Bangkok merupakan bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan perlu diupayakan sehingga mutu lulusannya setara dengan lulusan sekolah Indonesia di dalam negeri. Bahkan bila memungkinkan setingkat dengan sekolah internasional yang bermutu.

### **2. Kebijakan pendidikan di Sekolah Indonesia Bangkok**

Latar Belakang Perumusan Kebijakan. Terdapat beberapa landasan yang menjadi dasar adanya kebijakan pengembangan kompetensi profesional guru, beberapa landasan tersebut diantaranya, landasan historis maksudnya yakni sejarah diadakan

dan didirikan sebuah lembaga Sekolah Indonesia Luar Negeri yakni melayani masyarakat yang ada di Luar Indonesia dengan mengikuti dan melihat tujuan dan cita-cita Bangsa juga Pendidikan Nasional. Landasan geografis, yakni adanya sebuah kebijakan ini dikarenakan sebagai bentuk akan tanggung jawab yang tinggi dan serius akan tugas sebagai delegasi guru SILN demi menciptakan mutu dan mewujudkan tujuan Bangsa. Landasan yuridis yakni kebijakan pengembangan kompetensi professional guru ini memiliki landasan hukum dimana dapat kita ketahui pada kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang menjadi landasan kebijakan ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

### **3. Implementasi Kebijakan**

Terdapat beberapa jenis implementasi kebijakan yakni Implementasi yang berfokus pada dilaksanakannya atau tidak suatu kebijakan yang telah dibuat. Implementasi yang memiliki tujuan menghasilkan informasi terhadap hasil dari suatu kebijakan yang telah dilakukan. Dari hasil tersebut jelas bahwasannya kebijakan yang ada di SIB berkenaan dengan pengembangan kompetensi professional guru telah dilakukan dengan baik, hal tersebut karena kebijakan dipatuhi oleh segenap individu atau pihak yang harus melakukan dan terlaksananya sebagaimana mestinya.

### **4. Penilaian dan Evaluasi Kebijakan**

Penilaian dan juga evaluasi sebuah kebijakan adalah sebuah aktivitas untuk melihat apakah kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan dampak apa saja yang terjadi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun evaluasi yang dilakukan yakni menilai dan memerhatikan apakah sudah dilaksanakan apa belum dan apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak, selanjutnya perkumpulan atau musyawarah pelaksanaan berupa kritikan dan juga masukan atau perbaikan, setelah melakukan penilaian berupa kritikan terdapat pembinaan terhadap actor-aktor yaitu guru dalam menjalankan proses kebijakan dan terakhir yakni laporan hasil pelaksanaan.

### **5. Dampak kebijakan**

Adanya kebijakan pengembangan kompetensi professional guru yang dilaksanakan oleh Sekolah Indonesia Bangkok memiliki dampak positif. Seperti, menjadi ilmu dan juga bekal untuk guru yang pernah menjadi pendidik di SILN, dalam menjalankan tugas guru secara tanggung jawab dan professional, dapat menjadi bahan evaluasi sendiri bagi guru, apakah selama ini telah menjadi guru dengan baik dan sesuai dengan aturan juga cita-cita Bangsa, menjadi pengalaman agar di berikan kepada guru-guru yang lain di luar SILN untuk menjadi guru yang disiplin, tanggung jawab dan semestinya, bagi siswa dan siswi mendapatkan pendidikan yang baik dan maksimal meskipun dengan latar belakang siswa yang sedikit namun luar biasa. Luar biasa disini maksudnya yaitu tidak kalah dengan siswa yang banyak, mampu dan berani berjuang dan melawan tantangan pendidikan, ilmu dan pengalaman yang baik juga mendapatkan mutu pendidikan yang maksimal sebagai bekal melanjutkan studinya, bagi staff Kedutaan Besar Republik Indonesia, staff KBRI berlatar belakang dari sebuah tugas pekerjaan yang harus berpindah-pindah Negara dari Negara yang satu menuju Negara lain. Hal tersebut memudahkan bagi mereka untuk meletakkan dan mempercayakan pendidikan bagi anaknya.

## **6. Tingkat keberhasilan kebijakan**

Tingkat berhasil dan tidaknya sebuah kebijakan akan dapat kita lihat dari pelaksanaan yang ada, seluruh guru yang memasuki SIB dan wilayah KBRI melakukan dengan baik, tanggung jawab dan tidak ada yang menolak. Dengan demikian kebijakan dapat dikatakan berhasil dan berjalan sesuai harapan.

## **7. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan**

Minimnya tenaga pendidikan yang ada sehingga pengembangan kompetensi juga kurang maksimal termasuk hanya ada 1 Sekolah Indonesia yang ada di Bangkok, hal tersebut terdapat kesusahan dalam pelaksanaan perkumpulan dengan SILN yang lain. Selebihnya semua berjalan dengan baik tanpa terdapat kendala yang serius yang dihadapi.

## **8. Kebijakan pengembangan kompetensi professional guru**

Seluruh guru yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok harus menjadi guru yang mampu mengajar berbagai jenjang (multi grades), seluruh guru yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok harus mampu mengajar berbagai mata pelajaran (multi subjects), peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan harus dilakukan terus menerus, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan workshop. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama perguruan tinggi di tanah air, SEAMEO, pakar, instansi swasta, Kemendikbud dan guru SIB yang memiliki kapasitas pada bidang pelatihan, guru Sekolah Indonesia Bangkok harus mengembangkan kompetensi dengan mengikuti beberapa kegiatan peningkatan kapasitas guru seperti (1) pelatihan implementasi kurikulum 2013; (2) penguatan pendidikan karakter; (3) workshop pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS; (4) workshop implementasi kurikulum 2013 berbasis STEM; (5) mind map based learning; (6) Smart School; (7) Sea creative camp; (8) pelatihan menulis satu guru satu buku (sagusabu); (9) workshop pembuatan soal berbasis komputer; (10) pertemuan dan perkumpulan dengan sekolah Luar Negeri; (11) Perkumpulan dan pelatihan dengan staff KBRI; (12) seluruh seminar yang berbasis internasional, Selain hal tersebut, guru dan tenaga kependidikan harus mendapat dukungan untuk melakukan peningkatan kapasitas diri secara mandiri melalui kegiatan pelatihan secara daring dan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan seminar atau konferensi yang diselenggarakan di Bangkok atau Thailand dan ASEAN.

## **9. Guru professional di Sekolah Indonesia Bangkok**

Seorang guru akan dikatakan professional di Sekolah Indonesia Bangkok apabila telah melakukan serentetan indicator dan aturan yang telah di tetapkan oleh lembaga dan Negara yang ada. Sehingga dapat disimpulkan kebijakan pengembangan kompetensi professional guru bertujuan untuk memberikan dan menegaskan keseriusan guru dalam mengajar sebagai salah satu tujuan dan cita-cita Bangsa dan menciptakan guru yang berprofesional sehingga menjadikan mutu pendidikan yang berkualitas. Maka, dari evaluasi dan hasil disebutkan dengan jelas bahwa kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dikarenakan antara tujuan dari sebuah kebijakan dengan proses pelaksanaan kebijakan telah sesuai.

## **KESIMPULAN**

Terdapat latar belakang perumusan kebijakan pendidikan pengembangan kompetensi professional guru yang dilandasi oleh faktor atau landasan historis, geografis dan yuridis. Implementasi kebijakan telah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang ada serta disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Terdapat dampak dari implementasi kebijakan terhadap siswa dan guru yakni meningkatkan dan mencetak generasi yang bermutu dan berkualitas bertaraf internasional bagi siswa dan juga sebagai ilmu pengetahuan mengemban amanah sebagai guru yang bertanggung jawab dan menjalankan tugas yang professional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus. (2015). Modul Pelatihan Analisis Kebijakan. *Jurnal metodologi riset kebijakan*, 10.
- Aini, D. F. (2019). Self Regulated Pada Siswa Imigran Di Sekolah Indonesia Bangkok. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 14.
- Alamsyah. (2013). Analisis Impelementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis di Desa Bontotanga Kec Bontotiro Kab Bulukumba. *Doctoral Dissertation*.
- Aminudin, B. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 1.
- Anshori, M. (2017). Profesionalisme Guru Akuntansi Pasca Sertifikasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 110.
- Arifin, Z. (2014). *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Baharun, H. (2017). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madratsah. *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 13-18.
- Damarika. (2016). *Efektifitas Program Siswa Pintar Warga Sukowati dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sragen*. Jawa Tengah.
- Danil, D. (2017). Upaya Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di Sekolah . *Jurnal pendidikan universitas Garut*, 31-33.
- Darwis, M. (2018). Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran Pada Paket Keahlian Administrasi Perkantoran Di SMK Negeri 1 Gowa . *Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 106.

- Diarastuti R.A, d. S. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Smp Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017. *Doctoral Dissertation*.
- Disas, E. P. (2017). Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 161-164.
- Fitriani, C. (2017). Kompetensi Profesioanl Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di MTS Muhammadiyah Banda Aceh. *Magister Administrasi Pendidikan*, 89.
- Hamdani, H. (2017). Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru di UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. *Jurnal kebijakan pendidikan*, 176-179.
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* , 280-283.
- Kamars, M. D. (2017). Kebijakan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal ilmiah keislaman*, 63.
- Kurniawan, A. (2018). Tunjangan Profesi Pendidikan dan Latihan Profesi Dalam Kinerja Guru SMA. *Jurnal administrasi pendidikan*, 320-333.
- Kurniawan, B. D. (2011). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan* , 9.
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Magfiroh, A. (2017). Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Sarana untuk Menunjang Inovasi Pembelajaran di SMK Ma'arif NU 4 Pakis Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan*, 3.
- Mahfud, C. (2017). Rethinking the Politic of Islamic Education in Indonesia. *Jurnal madania*, 133.
- Mania, S. (2017). Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran. *Jurnal ilmu tarbiyah dan keguruan*, 222.
- Mappatunra, A. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Skripsi*.
- Meilina, S. d. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA Negeri 1 Kasui. *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*, 2.
- Miarso, Y. H. (2008). Peningkatan Kualifikasi Guru dalam Perspektif Teknologi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 67.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, Y. (2016). Profesionalisme Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal ilmu tarbiyah dan keguruan*, 118-123.
- Mulyadi. (2016). 2016. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta*.
- Putri, A. D. (2017). Pengembangan Profesi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 204.
- Ramdhani, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal publik*, 4.
- Regina, B. D. (2019). Pendampingan Membatik Shibori Pada Anak Kelas 5 di Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) Thailand. *Elementary School Education Journal*, 45.
- Saifuddin, A. (2016). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanaky, H. A. (2005). Sertifikasi. Dan Profesionalisme Guru di Era Reformasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3.
- Simatupang, P. (2017). Analisis Kebijakan Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. *Jurnal Pendidikan*, 7.
- Slamet, S. (2016). Pengembangan Kompetensi Profesional Berkelanjutan Dosen Vokasi Pada Pendidikan Vokasional di Lampung. *Jurnal pendidikan vokasi*, 173-174.
- Solihin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal studi islam*, 151-157.
- Sudarsana, K. (2016). Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 6.
- Supardi, U. S. (2015). Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Formatif*, 117.
- Suti, M. (2011). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. *Jurnal MEDTEK*, 2.
- Suwandi. (2016). Analisis Studi Kebijakan Pengelolaan Guru SMK Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 94-98.
- Syuhud. (2018). Konsep Profesionalitas Guru Perspektif Masyarakat Pesantren Di Madratsah Diniyah Pondok Pesantren Miftahul Uluh Lumajang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 154.
- Tarenaksa, B. N. (2017). Pelaksanaan Pembelajaran Teknik Lemmip Pada Ekstrakurikuler Kaligrafi di MIN Singaraja. *Jurnal pendidikan seni rupa undhiksa*, 143.
- Tasrial, d. D. (2015). *Pengembangan Karir Profesi Guru*. Yogyakarta: Gava Media.

Widoyoko, E. P. (2016). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.